

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 8

Rencana Anggaran Perubahan Belanja Naik Rp1,08 T

SEMARANG - Pemprov Jateng dan DPRD Jateng menyepakati Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2018. Jika dikalkulasi, dalam perencanaan tersebut, ada peningkatan anggaran Rp 1,08 triliun pada pos belanja pemerintah.

Artinya, anggaran belanja pemerintah dalam APBD murni 2018 sebesar Rp 24,993 triliun, dan direncanakan menjadi Rp 26,79 triliun. Adapun pos pendapatan yang semula sebesar Rp 24,413 triliun bertambah Rp 295,20 miliar menjadi Rp 24,780 triliun.

Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Syarifuddin mengatakan, peningkatan belanja itu dikarenakan adanya sejumlah program kegiatan yang membutuhkan dana tambahan. Semisal perbaikan jalan yang diakibatkan longsor, pengadaan alat laboratorium bagi SMA/SMK, alokasi penanganan sarana dan prasarana irigasi untuk mengatasi banjir.

Diakuinya, perubahan tersebut menimbulkan defisit sebesar Rp 1,371 triliun. Untuk menutup anggaran sehingga seimbang maka diambil dari pembiayaan neto yang jumlahnya sama persis dengan defisit anggaran.

"Keseimbangan keuangan harus terjaga antara belanja dan penerimaan. Untuk menutup defisit tersebut dari pembiayaan neto yang jumlahnya sama persis," kata Syarifuddin usai penandatanganan nota kesepakatan bersama KUPA PPAS Perubahan APBD 2018 di Gedung DPRD Jateng, Jumat (31/8).

Pembiayaan neto yang ia maksudkan adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan semula Rp 650 miliar bertambah menjadi Rp 861 miliar sehingga setelah perubahan maka penerimaan pembiayaan itu sebesar Rp 1,511 triliun. Sementara pengeluaran pembiayaan semula Rp 70 miliar kemudian bertambah 70 miliar sehingga setelah perubahan menjadi Rp 140 miliar. (H81-54)